

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah ekonomi yang sering terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah mencari solusi bijak untuk masalah kemiskinan yang sudah berlangsung lama¹. Kemiskinan tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, namun juga mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Kemiskinan dapat mencerminkan ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, namun juga menunjukkan kesenjangan dalam pembangunan dan distribusi sumber daya.

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tingginya angka pengangguran akibat kurangnya lapangan pekerjaan dan ketidaksesuaian antara keterampilan dan permintaan pasar, serta terbatasnya kesempatan kerja akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan, keterampilan, pelatihan kerja dan kesehatan berdampak pada daya saing angkatan kerja sehingga menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Kemudian upah minimum yang rendah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

¹ Marselina Marselina, Heru Wahyudi, dan Ukhti Ciptawaty, "Kontribusi Mahasiswa untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan melalui Entrepreneur School di Desa Wonoharjo, Tanggamus, Lampung," *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2023): 83–96.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan pengangguran terbuka dan upah minimum merupakan dua faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Indonesia.²

Merespons situasi ini, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan selama periode 2021-2024. Salah satu inisiatif utamanya adalah peningkatan alokasi dana desa untuk mendukung program padat karya dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memastikan bantuan sampai kepada kelompok masyarakat miskin.

Tahun 2023 dari Kemenko PMK, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga 0% pada tahun 2024. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program strategis, seperti peningkatan investasi di sektor-sektor padat karya dan optimalisasi program-program perlindungan sosial. Namun, tantangan

² Elvira Handayani Jacobus, Paulus Kindangen, dan Een N. Walewangko, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Sulawesi Utara," *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 19, no. 3 (2021): 86–103.

besar tetap ada dalam memastikan upaya-upaya ini efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.³

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan angka kemiskinan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Data berikut memberikan gambaran mengenai situasi kemiskinan di Indonesia dan tren penurunan yang terjadi pada periode 2021 hingga 2024.



Gambar 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2021-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2024

Pada gambar 1.1 menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2024. Menurut data BPS 2023, meskipun tingkat kemiskinan nasional turun dari 10,14% pada tahun 2021 menjadi 9,54% pada tahun 2022, penurunan ini lebih terkonsentrasi di daerah

³ Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). (2023). *Laporan Tahunan Pembangunan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan 2023*. Jakarta: Kemenko PMK., t.t.

perkotaan dengan basis pekerja formal yang kuat. Di daerah pedesaan, terutama di wilayah dengan dominasi pekerja informal, tingkat kemiskinan cenderung bertahan atau menurun secara lambat.⁴

Sisi lain, pada periode 2021-2024 juga ditandai dengan munculnya kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antara pekerja di sektor formal dan informal. Berdasarkan laporan Bappenas tahun 2022, persentase pekerja informal tetap tinggi, mencapai sekitar 57% dari total angkatan kerja. Pekerja di sektor informal cenderung mendapatkan upah yang lebih rendah dan tidak memiliki akses ke perlindungan sosial yang memadai. Hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan di kalangan pekerja informal tetap tinggi, meskipun terjadi penurunan TPT secara keseluruhan.⁵

Fenomena lain yang mewarnai periode 2021-2024 adalah tantangan pemulihan ekonomi yang dipengaruhi oleh tekanan inflasi. Menurut Bank Indonesia 2023, pada tahun 2022, inflasi di Indonesia mencapai 4,35%, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi yang tinggi menyebabkan kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan dasar lainnya, yang pada gilirannya memperburuk kondisi masyarakat miskin. Meskipun upah minimum mengalami kenaikan, daya beli masyarakat tetap tergerus oleh inflasi, terutama bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah.⁶

Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk mencakup pemulihan melalui program-program seperti menerapkan sistem

⁴ “BPS (2023). Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.” t.t.

⁵ “Bappenas (2022). Kajian Kebijakan Upah Minimum dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.” t.t.

⁶ “Bank Indonesia (2023). Laporan Inflasi Indonesia 2022. Jakarta: Bank Indonesia.” t.t.

ekonomi Islam, yaitu BANSOS (Bantuan Sosial) dari perorangan maupun dari pemerintah dan zakat infak shodaqoh dan wakaf (ZISWAF). Zakat mendistribusikan kekayaan, infak-shodaqoh dapat digunakan untuk modal usaha masyarakat yang membutuhkan dan wakaf dapat digunakan untuk membiayai proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.⁷ Hal ini terkait dengan konsep *maslaha* (kepentingan umum) yang menitikberatkan pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Menciptakan lapangan pekerjaan dapat berkontribusi dengan zakat. Zakat tidak hanya berbentuk bantuan langsung, tetapi juga dapat digunakan untuk menyediakan dana bagi para pengangguran untuk memulai usaha atau bekerja sendiri.⁸

Teori kemiskinan dari Ibnu Khaldun, yang mengidentifikasi bahwa kemiskinan bisa disebabkan oleh sistem ekonomi yang tidak adil, seperti monopoli, penimbunan barang, serta pajak yang tinggi. Ia menekankan pentingnya keberimbangan antara produksi, perdagangan, dan distribusi. Ketika pasar tidak berjalan semestinya, pekerjaan akan hilang, usaha terhenti, dan ini menyebabkan masyarakat jatuh dalam kemiskinan sistemik. Selain itu, kemiskinan dapat menjadi ancaman bagi akidah, akhlak, dan stabilitas sosial. Beliau menekankan peran instrumen keuangan syariah seperti zakat, infak, dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan, pengembangan penyerapan tenaga kerja dan mendorong terciptanya keadilan sosial. Dalam prinsip-prinsip syariah juga

⁷ Ira Humaira Hany dan Dina Islamiyati, "Pengaruh ZIS dan faktor Makro ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi* 25, no. 1 (2020): 118–31.

⁸ Zunaidi Arif, *Ekonomi Islam, Pengantar dalam memahami konsep dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, 1 ed. (IAIN Kediri Press, 2023).

ditekankan keadilan sosial dan penghindaran riba, dapat menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil.⁹

Pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan telah menjadi perhatian utama dalam kajian ekonomi dan kebijakan publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Secara umum, teori dari Ibnu Khaldun tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa apabila pembangunan menurun, maka jumlah pekerjaan juga menurun, yang menyebabkan rezeki pun berkurang dan akhirnya memicu stagnasi ekonomi. Ibnu Khaldun menghubungkan produktivitas manusia dengan keberlangsungan ekonomi dan menyiratkan bahwa kemiskinan dan kemunduran ekonomi bisa timbul karena ketiadaan aktivitas kerja yang produktif. Menurunnya tingkat pengangguran seharusnya mengindikasikan peningkatan kesempatan kerja, yang pada gilirannya mengarah pada penurunan tingkat kemiskinan. Namun, penelitian empiris menunjukkan bahwa hubungan ini tidak selalu linier dan bergantung pada berbagai faktor kontekstual, termasuk kualitas pekerjaan yang tersedia dan kebijakan upah minimum.¹⁰

Salah satu hasil studi yang relevan terkait hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sukirno, studi ini mengungkapkan bahwa penurunan TPT tidak selalu berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Sukirno menyatakan bahwa meskipun penurunan TPT menunjukkan peningkatan

⁹ Masturi Irlham, LC dan Malik Supar, Lc., Abidun Zuhri, "Ksatriasyair_Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun.pdf ., Pustaka AL-Kautsar," google book, Google Docs ISBN 978-979-592-561-3, diakses 28 Mei 2025, https://drive.google.com/file/d/1O7GzTXduRqJ10WNvjZpDM1yeMHDx_3RZ/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.

¹⁰ Masturi Irlham, LC dan Malik Supar, Lc., Abidun Zuhri.

kesempatan kerja, karakteristik pekerjaan yang tersedia sering kali tidak memenuhi standar minimum yang dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan, terutama di negara-negara berkembang.

Dengan kata lain, jika penurunan TPT disebabkan oleh peningkatan pekerjaan informal atau pekerjaan dengan upah yang sangat rendah, maka dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan akan minimal. Temuan ini mengungkapkan adanya gap atau ketidakselarasan antara variabel TPT (X_1) dan kemiskinan (Y) yang bisa disebabkan oleh kualitas pekerjaan yang diciptakan.¹¹

Sebagai perbandingan, penelitian oleh Agustina juga menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran belum tentu berdampak pada penurunan kemiskinan secara signifikan di Indonesia. Studi ini menyoroti bahwa sebagian besar lapangan pekerjaan yang tercipta bagi mereka yang keluar dari pengangguran adalah pekerjaan informal dengan upah rendah. Dengan kata lain, meskipun secara statistik tingkat pengangguran menurun, tingkat kemiskinan tidak mengalami penurunan yang proporsional karena peningkatan pekerjaan informal. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan TPT tidak secara otomatis berhubungan dengan pengurangan kemiskinan.¹²

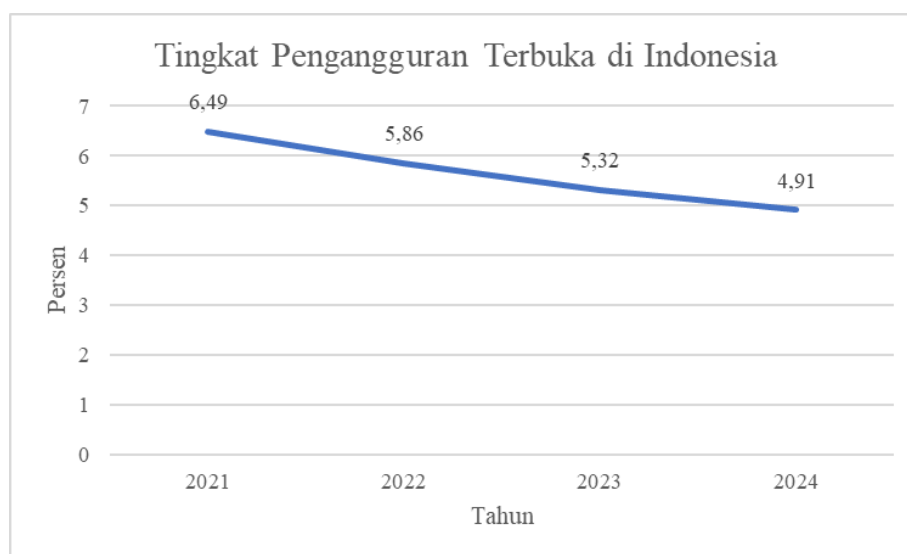
Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti dan Rahman di Indonesia menyatakan bahwa TPT menurun tidak selalu berdampak langsung pada kemiskinan, tergantung dari jenis pekerjaan yang tersedia.

¹¹ Sukirno S, "Dampak Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 123-134.," 2021, <https://doi.org/10.1234/jekp.v15i2.2021>.

¹² Agustina R, "Transisi Pekerjaan Formal ke Informal dan Dampaknya terhadap Kemiskinan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 12(3), 67-80.," 2023, <https://doi.org/10.9101/jpe.v12i3.2023>.

Widiastuti dan Rahman menemukan bahwa TPT dapat menurun bersamaan dengan meningkatnya pekerjaan informal yang tidak memberikan upah yang layak, sehingga efek terhadap kemiskinan menjadi tidak signifikan. Oleh karena itu, temuan Widiastuti dan Rahman mendukung gagasan bahwa ada gap dalam hubungan antara TPT dan kemiskinan, terutama jika penurunan TPT diikuti dengan penurunan kualitas pekerjaan yang tersedia.¹³

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Data berikut memberikan gambaran mengenai situasi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dan tren penurunan yang terjadi pada periode 2021 hingga 2024.



Gambar 1.2 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia Periode 2021-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

¹³ Widiastuti & Rahman, A. D., "Kualitas Pekerjaan dan Hubungannya dengan Tingkat Kemiskinan: Studi Kasus di Sektor Informal Indonesia. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 11(3), 45-60.," 2022, <https://doi.org/10.5678/jse.v11i3.2022>.

Gambar 1.2 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka mengalami tren penurunan di tahun 2021 hingga 2024. Pada periode 2021-2024 di Indonesia diawali dengan transisi dari puncak pandemi COVID-19 menuju fase pemulihan ekonomi. Pada tahun 2021, dampak pandemi terhadap tingkat pengangguran sangat signifikan. Menurut laporan BPS 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia mencapai 6,49% pada awal tahun 2021, meningkat akibat PHK besar-besaran di berbagai sektor, terutama sektor pariwisata, manufaktur, dan transportasi. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja kehilangan mata pencaharian dan beralih ke sektor informal atau usaha kecil yang tidak selalu mampu memberikan pendapatan yang layak.¹⁴

Seiring dengan meredanya pandemi dan dilonggarkannya pembatasan aktivitas, angka pengangguran mulai menurun. Kemudian pada tahun 2022, pemerintah berhasil menurunkan TPT menjadi 5,86%. Penurunan ini didorong oleh berbagai upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, bantuan ZISWAF (Zakat Infak Sedekah Wakaf) dan mendukung UMKM. Hal ini terus berlanjut hingga tahun 2024 sehingga penurunan mencapai angka 4,91%. Salah satu kebijakan penting yang diambil pemerintah adalah program padat karya yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang terdampak pandemi, terutama di daerah pedesaan.¹⁵

¹⁴ “Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.” t.t.

¹⁵ Muhammad Syahrul Hidayat, Rika Rizki Rohmah, dan Binti Nur Asiyah, “Implementasi Sistem Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Jawa Timur,” *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 1 (2023),

Selain itu, kebijakan upah minimum digunakan oleh pemerintah untuk menentukan tingkat kemiskinan dengan menghitung kebutuhan dasar dan jaring pengaman sosial seperti makanan, pakaian, dan transportasi. Upah yang lebih tinggi akan meningkatkan posisi, status, dan tingkat kepuasan kerja pekerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan kebahagiaan kerja, meningkatkan daya beli dan upah minimum dapat berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.¹⁶

Kajian mengenai upah minimum (X_2) menunjukkan korelasi yang lebih konsisten dengan penurunan kemiskinan. Menurut penelitian oleh Klein, peningkatan upah minimum dapat secara langsung meningkatkan pendapatan kelompok pekerja berupah rendah, yang merupakan kelompok rentan terhadap kemiskinan. Studi ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum sering kali berdampak pada pengurangan kemiskinan, terutama pada masyarakat yang bekerja di sektor formal. Selain itu, Klein juga menyatakan bahwa peningkatan upah minimum secara signifikan mengurangi kemiskinan di negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan meningkatkan daya beli pekerja dan memperbaiki kualitas hidup mereka.¹⁷

Berdasarkan data pada Ketenagakerjaan RI, perkembangan kenaikan upah minimum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Data berikut

http://repo.uinsatu.ac.id/33666/1/B_Implementasi%20Sistem%20Ekonomi%20Islam%20untuk%20Opengentasan%20kemiskinan.pdf.

¹⁶ Kasman Karimi dkk., “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika* 13, no. 1 (2023): 107–16.

¹⁷ Klein E, “The Impact of Minimum Wage Increases on Poverty in Developing Countries: Evidence from Asia. *Journal of Economic Development*, 46(3), 23-45,” 2021, <https://doi.org/10.1007/s10754-021-00282-1>.

memberikan gambaran mengenai upah minimum di Indonesia dan tren kenaikan upah minimum yang terjadi pada periode 2021 hingga 2024.



Gambar 1.3 Upah Minimum di Indonesia Periode 2021-2024

Sumber: Ketenagakerjaan RI

Gambar 1.3 menunjukkan kebijakan upah minimum juga mengalami perubahan kenaikan signifikan pada periode 2021-2024. Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia secara resmi menambah jumlah provinsi dari semula 34 menjadi 38 provinsi. Provinsi baru yang ditetapkan meliputi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Berdasarkan data Ketenagakerjaan Republik Indonesia, rata-rata upah minimum di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 2.568.653,56 dengan perhitungan yang mencakup 38 provinsi. Namun, perlu dicatat bahwa empat provinsi baru yang dimekarkan belum memiliki data rata-rata upah minimum yang ditetapkan. Apabila perhitungan dilakukan dengan menggunakan 34 provinsi, maka rata-rata upah minimum mencapai Rp. 2.822.907,45. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa upah minimum di Indonesia dalam periode 2021–2024 mengalami peningkatan yang signifikan.

Kementerian Ketenagakerjaan 2023 menjelaskan pada tahun 2022, pemerintah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,09% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini terus berlanjut hingga tahun 2024 yang mencapai angka Rp. 3.113.359,85. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan melindungi pekerja berupah rendah dari inflasi.¹⁸

Kenaikan upah minimum menjadi krusial dalam situasi di mana inflasi mencapai puncaknya akibat gangguan pasokan dan kenaikan harga bahan baku pada tahun 2022. Penetapan UMP yang lebih tinggi diharapkan dapat membantu pekerja mempertahankan daya beli mereka, terutama kelompok pekerja miskin. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan di lapangan, terutama terkait penerapannya di sektor informal yang sulit diawasi oleh pemerintah.

Teori – teori pengangguran terbuka atau TPT menggambarkan situasi dimana sebagian dari angkatan kerja tidak mampu memperoleh pekerjaan. Berdasarkan teori tingkat pengangguran terbuka, ketika tingkat pengangguran turun, jumlah orang yang memiliki pekerjaan meningkat, sehingga pendapatan masyarakat bertambah dan tingkat kemiskinan berkurang.¹⁹ Hal ini diperkuat dengan pendekatan teori dari Ibnu Khaldun pengangguran adalah bentuk

¹⁸ “Kementerian Ketenagakerjaan (2023). Laporan Tahunan Ketenagakerjaan Indonesia 2023. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan.” t.t.

¹⁹ N. Gregory Mankiw, *Principles of economics* (Cengage Learning, 2021), <https://thuvienso.hoasen.edu.vn/handle/123456789/11032>.

pemborosan potensi manusia yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang produktivitas dan kemaslahatan umum. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang membiarkan warganya tidak bekerja, padahal mereka mampu, akan mengalami ketimpangan ekonomi dan kerusakan sosial. Oleh karena itu, ia mendorong agar seluruh anggota masyarakat diberdayakan dan diarahkan untuk bekerja serta menghasilkan. Aktivitas ekonomi, dalam perspektifnya, adalah bagian dari *fardhu kifayah* yakni kewajiban kolektif yang jika tidak dipenuhi oleh sebagian masyarakat, maka seluruh masyarakat ikut menanggung dosanya.

Ibnu Khaldun juga menyoroti peran penting negara (*al-dawlah*) dalam mengatasi ketimpangan dan memastikan tersedianya lapangan kerja bagi rakyatnya. Beliau percaya bahwa negara harus mengatur mekanisme pasar agar berjalan adil, mencegah monopoli, dan menjaga agar tidak terjadi penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Negara juga harus menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan setiap individu mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, sesuai dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam.

Dengan demikian, negara bertanggung jawab secara langsung untuk meminimalkan kemiskinan dan pengangguran.²⁰ Berdasarkan hal tersebut penurunan TPT harus diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Penurunan pengangguran di Indonesia berkorelasi dengan penurunan kemiskinan, namun mereka

²⁰ Masturi Irfham, LC dan Malik Supar, Lc., Abidun Zuhri, "Ksatriasyair_Kitab Muqaddimah_Ibnu Khaldun.pdf ., Pustaka AL-Kautsar."

menekankan bahwa pengurangan kemiskinan tidak hanya tergantung pada penurunan TPT, tetapi juga pada kualitas lapangan kerja yang diciptakan.²¹

Dalam perspektif ekonomi islam, pengurangan dan kemiskinan merupakan dua permasalahan sosial-ekonomi salah dan satu tujuan utama karena sejalan dengan prinsip keadilan sosial (*al-'adl*) dan pemerataan kesejahteraan (*taqsim al-tharwah*). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi mencerminkan kurangnya akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak, yang bertentangan dengan prinsip Islam dalam menjamin hak setiap individu untuk memperoleh penghidupan yang halal dan bermartabat.²²

Konteks ini, BPS 2023 mencatat bahwa penurunan TPT di Indonesia tidak selalu diikuti dengan penurunan kemiskinan karena tingginya tingkat pekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah. Meskipun angka TPT menurun, jika pekerjaan yang ada tidak cukup memadai dari segi upah dan perlindungan sosial, maka pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan akan terbatas. Teori ketergantungan pekerjaan berkualitas ini sesuai dengan kondisi di Indonesia, di mana ketidakcukupan pekerjaan berkualitas menjadi tantangan utama dalam mengurangi kemiskinan meskipun TPT menurun.

Selain itu, upah minimum di Indonesia ditetapkan dengan tujuan melindungi pekerja dari praktik pembayaran upah rendah serta memberikan mereka daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Teori upah

²¹ Kusnadi & Lestari, P E., "Dampak Penurunan Pengangguran terhadap Kemiskinan: Peran Kualitas Pekerjaan di Sektor Informal. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 15(2), 110-125.," 2021, <https://doi.org/10.1234/jekp.v15i2.2021>.

²² Agus Rojak Samsudin dkk., "Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia; Telaah Dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif Syariah," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (31 Oktober 2024): 115–34, <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.62>.

minimum dari Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa upah yang adil akan mendorong pekerja untuk bekerja dengan produktif, sedangkan ketidakadilan dalam upah akan menurunkan semangat kerja dan merusak produktivitas. Berdasarkan hal tersebut peningkatan upah minimum akan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, terutama bagi pekerja berupah rendah.²³ Menurut teori distribusi pendapatan, peningkatan upah minimum memungkinkan terjadinya redistribusi pendapatan dari pemilik modal ke tenaga kerja.²⁴

Hasil penelitian oleh Simanjuntak menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum di Indonesia berdampak positif dalam mengurangi kemiskinan, khususnya di kalangan pekerja formal. Simanjuntak menemukan bahwa kebijakan upah minimum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang bekerja di sektor formal, meskipun pengaruhnya terhadap pekerja di sektor informal masih terbatas. Ini sejalan dengan konsep upah minimum, yang membedakan antara pekerja di sektor formal dan informal. Pada sektor formal, kebijakan upah minimum diterapkan lebih ketat, sedangkan di sektor informal penerapannya sulit dilakukan.²⁵

Sementara itu dalam ekonomi islam, upah minimum yang rendah atau tidak sesuai dengan kebutuhan hidup juga tidak mencerminkan prinsip *al-kifayah* (kecukupan), yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan

²³ Masturi Irlham, LC dan Malik Supar, Lc., Abidun Zuhri, “Ksatriasyair_Kitab Muqaddimah_Ibnu Khaldun.pdf ., Pustaka AL-Kautsar.”

²⁴ Arindrajit Dube, “Impacts of minimum wages: review of the international evidence,” *Independent Report. UK Government Publication*, 2019, 268–304.

²⁵ Simanjuntak P, “‘Dampak Upah Minimum terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia.’ *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45-58,” 2020.

dasar manusia. Oleh karena itu, dalam kerangka ekonomi syariah, pengurangan TPT dan penetapan upah minimum yang adil merupakan instrumen penting dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah dan pelaku ekonomi dituntut untuk menciptakan sistem kerja yang inklusif, mendukung kewirausahaan berbasis syariah, dan memastikan distribusi pendapatan yang adil. Dengan begitu, tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*).²⁶

Pengaruh TPT dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Indonesia menunjukkan fenomena bahwa upah minimum yang ditetapkan secara nasional maupun di tingkat provinsi menjadi instrumen penting dalam pengurangan kemiskinan. Bappenas tahun 2022 mencatat bahwa kebijakan upah minimum telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin, meskipun ada variasi efektivitas antar wilayah. Selain itu, fenomena penurunan TPT selama periode 2021-2024 menunjukkan bahwa meskipun angka pengangguran menurun, tingkat kemiskinan tidak serta-merta ikut menurun secara signifikan. Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya persentase pekerja informal dengan upah yang rendah.²⁷

Studi lain oleh Kementerian Ketenagakerjaan 2023 menunjukkan bahwa upah minimum yang memadai dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di kalangan pekerja, terutama di sektor formal. Namun,

²⁶ Zulaikah Zulaikah, "Implementasi Maqashid Al-Syariah Dalam Penetapan Upah Minimum Pekerja Berbasis Keadilan," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (20 Juni 2022), <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.10689>.

²⁷ "Bappenas (2022). Strategi Penanganan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2022-2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.," t.t.

kelemahan dari kebijakan ini adalah ketidakmerataannya di sektor informal, di mana pekerja seringkali tidak terjangkau oleh kebijakan upah minimum. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi pengurangan kemiskinan, meskipun TPT menurun dan upah minimum dinaikkan.²⁸

Dengan demikian, teori dan penelitian yang ada menunjukkan bahwa penurunan TPT dan peningkatan upah minimum adalah strategi penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Namun, efektivitas kedua variabel ini bergantung pada kualitas pekerjaan yang diciptakan dan bagaimana kebijakan upah minimum diterapkan secara merata di seluruh sektor ekonomi.

Berdasarkan temuan-temuan ini, variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak selalu memberikan hasil yang konsisten dalam mengurangi kemiskinan, dibandingkan dengan variabel upah minimum yang memiliki dampak yang lebih stabil. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan menarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kedua variabel ini terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, terutama dalam periode 2021-2024.

Maka dari itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2021-2024.**

²⁸ Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). (2023). *Laporan Tahunan Pembangunan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan 2023*. Jakarta: Kemenko PMK.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia Periode 2021-2024?
2. Bagaimana Upah Minimum di Indonesia Periode 2021-2024?
3. Bagaimana Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2021-2024?
4. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2021-2024?
5. Bagaimana Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2021-2024?
6. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Secara Simultan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Periode 2021-2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia Periode 2021-2024.
2. Untuk menganalisis Upah Minimum di Indonesia Periode 2021-2024.
3. Untuk menganalisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2021-2024.
4. Untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2021-2024.
5. Untuk menganalisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2021-2024.

6. Untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Secara Simultan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Periode 2021-2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap:

1. Pengembangan Riset Akademik

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada riset akademik di bidang ekonomi dan sosial. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber data untuk penelitian lanjutan.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, studi ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi konsep makroekonomi terkait kebijakan pengangguran dan upah serta memahami dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan.

E. Telaah Pustaka

1. “Pengaruh Tingkat Pengangguran, Upah Minimum, Pendidikan, dan Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010 – 2022” dari Rizki Alfari, UIN Jakarta, 2024.²⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran, upah minimum, dan pendidikan (diukur dengan rata-rata lama sekolah) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan investasi (diukur dengan Penanaman Modal Dalam Negeri) berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Persamaan penelitian

²⁹ Rizki Alfari, “Pengaruh Tingkat Pengangguran, Upah Minimum, Pendidikan, dan Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010–2022” (B.S. thesis, FEB UIN JAKARTA), diakses 13 September 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/79320>.

ini adalah meneliti tingkat pengangguran dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2021-2024. Perbedaan dalam variabel yang diteliti, di mana penelitian saat ini tidak mencakup pendidikan dan investasi, serta perbedaan tahun periode.

2. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, Pengangguran, Inflasi, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2022” dari Haritsah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.³⁰ Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan, pendidikan, pengangguran, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Persamaan penelitian ini adalah meneliti pengangguran, upah minimum terhadap kemiskinan. Sedangkan perbedaan dalam variabel yang digunakan, di mana penelitian di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2022, sedangkan di penelitian saat ini di Provinsi-Provinsi yang ada di Indonesia periode 2021-2024.
3. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan *Human Capital* Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua 2017-2022” dari Fauzan Salim Khuldi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.³¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini menunjukkan

³⁰ Haritsah, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, Pengangguran, Inflasi, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur” (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/69458/>.

³¹ Fauzan Salim Khuldi, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan *Human Capital* Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua 2017-2022” (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/62788/>.

bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap angka kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Namun variabel tingkat pengangguran terbuka dan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Papua pada periode yang sama. Persamaan dalam pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap kemiskinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel pertumbuhan ekonomi, *human capital*, tempat penelitian yaitu di Papua dan tahun penelitian. Namun dalam penelitian saat ini menggunakan tempat di Indonesia dengan seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia mulai tahun 2021-2024 sebagai tahun penelitiannya.

4. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2014-2019 dari Kama Ibrahim, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.”³² Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti tingkat pengangguran terbuka, upah minimum terhadap kemiskinan. Sedangkan perbedaan terletak

³² Kama Ibrahim, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2014-2019” (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), <https://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/44141/>.

pada tahun penelitian dan di wilayah provinsi Indonesia yaitu tahun 2014-2019 dimana Provinsi di Indonesia masih 34 provinsi, Namun penelitian saat ini di provinsi Indonesia yang semula 34 provinsi menjadi 38 provinsi akibat pemekaran wilayah di papua. Tahun penelitian saat ini dimulai dari tahun 2021-2024.

5. “Analisis Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia Periode 2010 – 2019)” dari Rangga Dwi Putera, UIN Jakarta, 2020.³³ Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara rendahnya angka harapan hidup sekolah, upah minimum yang tidak memadai, serta tingginya pengangguran dengan peningkatan kemiskinan. Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti upah minimum dan pengangguran terhadap kemiskinan. Sedangkan perbedaan terletak pada angka harapan lama sekolah sebagai variabel, dan provinsi di indonesia. Namun penelitian saat ini menggunakan provinsi baru di indonesia yang pada tahun 2022 34 provinsi menjadi 38 provinsi.

F. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis 1 (H₁)

Teori tingkat pengangguran terbuka dari Ibnu Khaldun berpendapat bahwa apabila pembangunan menurun, maka jumlah pekerjaan juga menurun, yang menyebabkan rezeki pun berkurang dan akhirnya memicu

³³ Rangga Dwi Putera, “Analisis Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia Periode 2010–2019)” (B.S. thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55407>.

stagnasi ekonomi. Ibnu Khaldun menghubungkan produktivitas manusia dengan keberlangsungan ekonomi dan menyiratkan bahwa kemiskinan dan kemunduran ekonomi bisa timbul karena ketiadaan aktivitas kerja yang produktif. Berdasarkan hal tersebut pengangguran terbuka berkontribusi terhadap kemiskinan karena individu yang menganggur tidak memiliki pendapatan, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini diperkuat dengan penelitian Kusnadi dan Lestari penurunan pengangguran di Indonesia berkorelasi dengan penurunan kemiskinan, namun mereka menekankan bahwa pengurangan kemiskinan tidak hanya tergantung pada penurunan TPT, tetapi juga pada kualitas lapangan kerja yang diciptakan. Dari penjelasan tersebut, adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Keterkaitan Tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2021-2024.

H_0 : Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2021-2024

H_1 : Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2021-2024.

2. Hipotesis 2 (H_2)

Teori upah minimum dari Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa upah yang adil akan mendorong pekerja untuk bekerja dengan produktif, sedangkan ketidakadilan dalam upah akan menurunkan semangat kerja dan merusak produktivitas. Peningkatan upah minimum akan mengurangi

kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, terutama bagi pekerja berupah rendah. Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh Simanjuntak menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum di Indonesia berdampak positif dalam mengurangi kemiskinan, khususnya di kalangan pekerja formal. Simanjuntak menemukan bahwa kebijakan upah minimum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang bekerja di sektor formal, meskipun pengaruhnya terhadap pekerja di sektor informal masih terbatas. Ini sejalan dengan konsep teori upah minimum, yang membedakan antara pekerja di sektor formal dan informal. Pada sektor formal, kebijakan upah minimum diterapkan lebih ketat, sedangkan di sektor informal penerapannya sulit dilakukan. Dari penjelasan tersebut, adapun hipotesis dalam hal ini yaitu:

a. Keterkaitan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2021-2024.

H_0 : Upah minimum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2021-2024.

H_1 : Upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2021-2024.

3. Hipotesis 3 (H_3)

Teori tingkat pengangguran terbuka, upah minimum dan kemiskinan dari Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa apabila pembangunan menurun, maka jumlah pekerjaan juga menurun, yang menyebabkan rezeki pun berkurang dan akhirnya memicu stagnasi ekonomi. Ibnu Khaldun

menghubungkan produktivitas manusia dengan keberlangsungan ekonomi dan menyiratkan bahwa kemiskinan dan kemunduran ekonomi bisa timbul karena ketiadaan aktivitas kerja yang produktif. Selain itu, upah yang adil akan mendorong pekerja untuk bekerja dengan produktif, sedangkan ketidakadilan dalam upah akan menurunkan semangat kerja dan merusak produktivitas. Ibnu Khaldun juga menyoroti bahwa kemiskinan bisa disebabkan oleh sistem ekonomi yang tidak adil, seperti monopoli, penimbunan barang, serta pajak yang tinggi. Ia menekankan pentingnya keberimbangan antara produksi, perdagangan, dan distribusi. Ketika pasar tidak berjalan semestinya, pekerjaan akan hilang, usaha terhenti, dan ini menyebabkan masyarakat jatuh dalam kemiskinan sistemik. Sejalan dengan fenomena bahwa upah minimum yang ditetapkan secara nasional maupun di tingkat provinsi menjadi instrumen penting dalam pengurangan kemiskinan. Bappenas tahun 2022 mencatat bahwa kebijakan upah minimum telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin, meskipun ada variasi efektivitas antar wilayah. Selain itu, fenomena penurunan TPT selama periode 2021-2024 menunjukkan bahwa meskipun angka pengangguran menurun, tingkat kemiskinan tidak serta-merta ikut menurun secara signifikan. Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya persentase pekerja informal dengan upah yang rendah. Dari penjelasan tersebut, adapun hipotesis dalam hal ini yaitu:

- a. Keterkaitan tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2021-2024.

H_0 : Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum secara simultan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia periode 2021-2024.

H_1 : Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia periode 2021-2024.